

PERDES

2023



PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2024



DESA KENEP
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK

Sekretariat Desa Kenep

Jl. Joyoboyo No. 03

Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenep Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Kenep Nomor 2 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 1.784.336.500,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp 1.784.336.500,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp 0,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | |

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | <u>0,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kenep.

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DESA KENEP,

JOKO SUSANTO,

Diundangkan di Kenep
pada tanggal 27 Desember 2023



LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KENEP

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 452.950.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.330.866.500,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 520.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.784.336.500,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 655.461.812,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 524.360.600,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 550.514.088,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 54.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.784.336.500,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KENEP

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 452.950.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.330.866.500,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 520.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.784.336.500,00 | |
| 1 | 5. | BELANJA | | |
| | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>934.347.900,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 795.566.812,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 36.690.792,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 36.690.792,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 250.579.020,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 250.579.020,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20.892.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 20.892.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D ll) | 75.770.000,00 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 75.770.000,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 17.100.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 17.100.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.795.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.795.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 33.540.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.540.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 25.000.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 1.1.90 | | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 330.200.000,00 | PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 330.200.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 66.359.088,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 12.772.088,00 | ADD, PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 12.772.088,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** | 53.587.000,00 | PAD, PBH |
| | |) | | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 53.587.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Karsipan | 4.400.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 2.400.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 2.000.000,00 | DDS |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 23.230.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 2.625.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.625.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.525.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.525.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.085.000,00 | DDS |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.085.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1.425.000,00 | DDS |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.425.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 8.620.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.620.000,00 | |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 2.850.000,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.850.000,00 | |
| 1.4.91 | | Forum Pembina Desa | 5.100.000,00 | ADD |
| 1.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.100.000,00 | |
| 1.4.99 | | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 0,00 | DLL |
| 1.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 44.792.000,00 | |
| 1.5.06 | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 22.192.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22.192.000,00 | |
| 1.5.90 | | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 15.100.000,00 | DDS |
| 1.5.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.100.000,00 | |
| 1.5.99 | | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | 7.500.000,00 | PAD |
| 1.5.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 647.769.000,00 | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 76.400.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 56.400.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 56.400.000,00 | |
| 2.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 20.000.000,00 | DDS |
| 2.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 116.214.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb) | 2.600.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.600.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumit, Lansia, Insentif) | 92.214.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 92.214.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 19.000.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 6.000.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 2.400.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 435.155.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 76.640.000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 76.640.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 203.515.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 203.515.000,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 5.000.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 2.3.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 150.000.000,00 | DDS |
| 2.3.99 | 5.3. | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 10.000.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 10.000.000,00 | DDS |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 10.000.000,00 | |
| 2.6.01 | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 10.000.000,00 | DDS |
| 2.6.01 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>107.407.600,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 750.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 750.000,00 | DDS |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 750.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 76.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 61.000.000,00 | DDS, PAD, SWD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.000.000,00 | |
| 3.2.04 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 15.000.000,00 | PAD |
| 3.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 6.200.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 6.200.000,00 | |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.200.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 24.457.600,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9.832.800,00 | ADD, DDS |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.832.800,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 9.700.000,00 | ADD, DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.700.000,00 | |
| 3.4.04 | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 4.500.000,00 | DDS |
| 3.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | |
| 3.4.99 | | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 424.800,00 | ADD |
| 3.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 424.800,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>40.812.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 29.000.000,00 | |
| 4.2.01 | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran) | 4.000.000,00 | DDS |
| 4.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 4.2.04 | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 25.000.000,00 | DDS |
| 4.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 25.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 11.812.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8.812.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.812.000,00 | |
| 4.4.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 3.000.000,00 | DDS |
| 4.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>54.000.000,00</u> | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 54.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 54.000.000,00 | |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 54.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.784.336.500,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

